

## ORIENTASI PROFESI JURNALISME\*

Oleh Ashadi Siregar

### ( 1 )

Suatu profesi, menjalankan fungsi yang bersifat imperatif bagi institusi yang didukungnya. Sifat imperatif yaitu yang harus dijalankan ini datang dari kondisi struktural dalam dimensi ekonomi-politik yang melingkupi institusi tersebut. Pada sisi lain berlangsung fungsi bersifat subyektif sesuai dengan preferensi setiap pelaku profesi. Preferensi dari pihak sumber atau pelaku profesi yang menghadirkan media dapat bersifat komplementer sehingga paralel dengan motif pihak sasaran atau khalayak, atau bertolak dari orientasi bersifat otentik dari diri pelaku profesi.

Pilihan dalam kerja dapat ditelusuri dari dasar, yaitu paradigma yang mendasari orientasi suatu profesi. Orientasi dalam profesi media pada hakikatnya dimulai dari pendefinisian dari keberadaan media, apakah sistem media dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pragmatis dalam konteks politik, ekonomi atau sosial, ataukah dihadirkan dalam fungsi kultural dalam kehidupan publik. Dengan pilihan orientasi ini seorang pelaku profesi media akan mempertanyakan konteks hasil kerjanya dalam masyarakat.

Apapun informasi yang disampaikan atau diterima, dalam pemanfaatannya masing-masing pihak memiliki preferensi dalam menghadapi materi informasi. Preferensi sumber atau komunikator pada dasarnya untuk orientasi pragmatis untuk kekuasaan politik dan ekonomi, atau orientasi kultural. Sementara preferensi khalayak dapat berupa kepentingan pragmatis sosial maupun psikhis.

Keberadaan suatu media massa dengan sendirinya ikut terbangun dari kualitas warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya untuk menyediakan informasi bagi person-person yang berada dalam berbagai institusi sosial, media massa hadir sebagai institusi sosial, dilekati dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan dalam sistem sosial ini menjadikan pengelola media sebagai aktor sosial yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan (*expectation*) dari masyarakat.

Suatu profesi media pada dasarnya menjalankan fungsi di dalam institusi sosialnya untuk memenuhi harapan publik. Harapan inilah yang menjadi pendorong dalam memformat fungsi imperatif yang harus dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. Dorongan yang datang dari masyarakat, dapat dalam dua wujud, yaitu motif psikhis dan sosial. Jika motif pertama membawa seseorang ke dunia-dalam (*inner world*) yang bersifat subyektif, maka dorongan kedua membawa seseorang ke dunia-luar yang bersifat empiris obyektif. Media massa akan menyuplai masyarakatnya untuk dapat memasuki dunia yang dipilihnya. Pada tahap akhir, konsumsi informasi media massa diharapkan menjadi landasan bagi khalayak dalam keberadaannya di ruang publik (*public sphere*).

### ( 2 )

Keberadaan moda komunikasi tidak terlepas dari kegiatan manusia di ruang publik. Karenanya dalam memandang fenomena komunikasi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ruang publik yang menjadi ajangnya. Secara sederhana ruang publik pada dasarnya terwujud melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Sementara setiap interaksi sosial dapat memiliki dua muka, pertama dari sisi positif yaitu hubungan sosial yang akan dibangun atau dipelihara, atau sisi sebaliknya untuk menghancurkan hubungan sosial.

---

\* Disampaikan pada SEMINAR 10 TAHUN SOLOPOS MEMBICARAKAN KREDO JURNALIS: INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME. Surat kabar Harian Solopos, Surakarta 11 Agustus 2007

Dari sini cara pandang atas proses komunikasi dapat dimulai dengan kerangka konseptual tentang hegemoni di satu pihak atau pembebasan pada pihak lain. Yang pertama, proses komunikasi pada dasarnya merupakan perang wacana terus-menerus untuk membawa khalayak kepada nilai yang harus dimenangkan dalam kontes kehidupan di ruang publik. Sedangkan yang kedua adalah upaya menjaga agar publik dapat memiliki otonomi dan independensi dalam kehidupannya di ruang publik.

Ruang publik dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai tandingan negara atau kuasi negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara warga disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*). Sementara dalam menghadapi kekuasaan kapitalisme pasar, warga masyarakat sebagai konsumen, yang dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen dalam konteks kapitalisme. Dalam konteks kekuatan kolektif warga masyarakat menjadi massa yang kehilangan posisi personal, dikalahkan oleh homogenisasi yang berlangsung dalam kolektivisme.

### ( 3 )

Secara ideal, ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal, yang bersih dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme). Dengan kata lain, idealisasi kehidupan publik adalah pada kehidupan warga masyarakat, dalam proses interaksi personal atas dasar kultural. Ciri dari interaksi semacam ini berdasarkan keberadaan person yang memiliki otonomi dan independensi. Interaksi sosial ditandai dengan posisi personal dalam tawar-menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik (*public discussion*) atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan atas dasar kekerasan dalam dominasi dan hegemoni (kekuatan fisik maupun psikologis). Kekerasan dapat terjadi secara personal, atau institusional oleh negara maupun kuasi negara dalam masyarakat. Disini lahir fungsi imperatif media massa, sebagai perpanjangan/ekstensi dari ruang publik tersebut.

Dalam ruang publik dengan budaya demokratis, pertarungan wacana dapat dilakukan oleh siapapun dari kehidupan publik. Sementara dalam sistem politik otoritarian, produksi wacana dengan menggunakan moda komunikasi dimonopoli sebagai instrumen hegemoni oleh penguasa negara dan modal. Lewat kekuasaan hegemoni ini makna apa yang dianggap dan diterima sebagai kebenaran menjadi bawah sadar warga masyarakat. Dengan begitu pada satu sisi pekerja media perlu menyadari adanya kekuatan hegemoni yang menanamkan kebenaran ala kekuasaan, agar tidak terjebak sebagai aparatus yang melaksanakan kepentingan dari kekuasaan.

Pada sisi lain, perlunya penumbuhan kesadaran tentang proses komunikasi dalam kehidupan publik dalam konteks *civil society*. Media komunikasi menjalankan fungsi guna memenuhi motif khalayak untuk tujuan obyektifikasi dan subyektifikasi, bukan semata-mata untuk kepentingan psikhis dan sosial dalam konteks pragmatis, tetapi dimaksudkan untuk memelihara otonomi ruang pribadi (*personal space*) dari setiap warga komunitas. Secara sederhana obyektifikasi (*objectification*) dapat dilihat sebagai proses rasional untuk mencapai obyektifitas terhadap dunia-luar (*outer-world*), sedangkan subyektifikasi (*subjectification*) dimaksudkan untuk membangun subyektifitas bagi dunia-dalam (*inner-world*) bagi seseorang.

Kenyataan sosial bersifat obyektif diperlukan sebagai landasan dalam memahami kehidupan di ruang publik, untuk kemudian warga dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam kehidupan tersebut. Kata kunci dalam komunikasi semacam ini adalah warga menjadi subyek, dalam pada itu ketidak-sesuaian (*misfit*) dengan kehidupan publik adalah dikarenakan hambatan dalam keikut-sertaan dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi

adalah menjadikan warga ambil bagian (*sharing*) dalam kehidupan publik, mengingat proses obyektifikasi dapat berlangsung hanyalah dengan bantuan moda komunikasi. Tetapi tentunya media tidak secara otomatis akan fungsional. Media juga dapat gagal dalam fungsi ini, mengingat kecenderungan komodifikasi menjadikan media terlalu *trivial*, *commercial*, *spectacle* dan *fragmented* atau biasa disebut sebagai orientasi tabloidisasi media. Untuk menghadapi orientasi tabloidisasi ini muncul sejumlah pandangan idealitis atas keberadaan media, yaitu orientasi yang relevan dalam kehidupan di ruang publik atas landasan kultural.

( 4 )

Proses komunikasi dengan pendekatan kultural dapat dibicarakan dalam landasan *civil society* sebagai format kehidupan publik yang perlu diwujudkan, dimulai dari paradigma yang menggerakkan dinamika kehidupan publik yang berbasiskan nilai kultural. Nilai kultural ini merupakan pemaknaan atas setiap kegiatan dalam ruang publik. Ini dapat dilihat dengan dua cara, pertama secara negatif yaitu dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar harus dijauhkan dari kehidupan warga masyarakat, dan kedua secara positif berorientasi pada kemanusiaan dari kehidupan warga masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, setiap institusi sosial memiliki otonomi dan independensinya dalam orientasi kepada harkat kemanusiaan warganya.

Membangun *civil society* pada dasarnya adalah di satu pihak membalik arus utama yang tadinya dari kekuasaan negara dan pasar ke warga, menjadi arus dari warga ke kekuasaan negara dan pasar. Di pihak lain membangun ruang publik yang secara relatif memiliki otonomi dan independensi, yang di dalamnya berlangsung kegiatan kultural dalam berbagai aspek kehidupan warga masyarakat yang dapat fungsional sebagai variabel bagi kekuasaan negara dan pasar. Dalam bahasa lain adalah mendefinisikan warga sebagai subyek yang memiliki otonomi dan independensi dalam mewujudkan kepentingan rasionalnya di ruang publik.

*Civil society* sebagai format kehidupan publik diharapkan dapat menjadi visi bersama penyelenggaraan media massa. Dari visi semacam ini dapat dibayangkan misi yang perlu dijalankan, sesuai dengan fungsi media massa umumnya dan televisi khususnya dalam ruang publik. Misi pengwujudan fungsi dalam kehidupan publik pada dasarnya untuk memelihara 3 aspek yaitu ruang kebebasan dan netralitas, basis rasionalitas dan kecerdasan, dan orientasi pada derajat kemanusiaan. Ruang kebebasan dan netralitas dijaga dengan menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar, basis rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial, dan orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi dan demokrasi.

Dengan demikian, dalam diversitas sumber dan wacana, seluruhnya diharapkan bertolak dari visi yang sama, sehingga komunikasi kultural akan menuju muara yang sama pula, yaitu ruang publik yang akan dibangun. Untuk itu hasil kerja bukan semata-mata komoditas yang nilainya hanya dilihat dalam konteks politik atau ekonomi. Setiap hasil kerja dari profesi media merupakan wacana yang akan memperkaya ruang publik.

( 5 )

Media massa sebagai institusi sosial pada dasarnya berfungsi untuk membawa khalayaknya ke ruang publik, baik sebagai media hiburan maupun media jurnalisme. Dengan materi hiburan dia membekali khalayak untuk dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan kultural. Sedang dengan materi jurnalisme diharapkan dapat memberi bahan baku bagi khalayak untuk membentuk persepsi secara obyektif dan rasional mengenai isu

publik. Kesadaran tentang fungsi media memeroses khalayaknya untuk hadir di ruang publik secara tepat, akan membuat para profesionalnya mempertanyakan output kerjanya.

Kesadaran atas konteks hasil kerja merupakan titik tolak dari keberadaan suatu profesi. Artinya keberadaan profesi memiliki kualitas yang dibangun melalui gambaran ideal atas profesi sebagai suatu kolektivitas dalam kehidupan publik. Dari sini perlu dikembangkan pandangan bahwa secara ideal ruang profesional ranah media sebagai zona bebas, yang di dalamnya kaum profesional memiliki otonomi dan independensi. Dengan begitu kegiatan profesional dapat sepenuhnya digunakan dalam konteks kebenaran yang berasal dari ruang publik untuk materi faktual yang diwujudkan sebagai informasi jurnalisme, serta berkonteks estetika untuk materi fiksional dalam informasi hiburan. Manakala orientasi korporasi bisnis atau institusi negara mendikte ruang profesional untuk kepentingan modal atau kekuasaan, bolehlah dipandang sebagai menginjak dan melecehkan kaidah profesionalisme media.

Tetapi soal ini tentunya tidak bisa hitam putih, karena interaksi ruang profesional media dengan sistem bisnis dan negara merupakan hubungan tarik-ulur. Dalam kondisi semacam ini kaum profesional selalu berjaga-jaga untuk tidak menjadi bagian sub-ordinatif yang mutlak sehingga terperangkap dalam posisi mental submisif terhadap sistem korporasi ekonomi atau politik.

Manajemen dan orientasi usaha mencakup akunting dan personalia dalam kaitan produksi dan pemasaran. Parameternya adalah efektifitas dan efisiensi dalam konteks modal, biaya dan profit. Ini sudah menjadi hukum besi dalam setiap unit usaha ekonomi. Sementara dalam konteks negara, sebutan profit berganti dengan kekuasaan (*power*). Dengan begitu kalau seorang profesional masuk ke dalam suatu wilayah kerja bisnis atau negara, selayaknya dia menilai lebih dulu iklim manajemen dan orientasi yang akan melingkupinya. Dengan kata lain, pada tataran ideal hendaknya seorang profesional media dapat menilai, apakah dia mau atau tidak berada dalam setting bisnis atau negara yang akan diisinya, dengan peluang untuk memelihara nilai otonomi dan independensinya.

Seseorang dapat berfungsi sebagai profesional dalam mendukung institusi bisnis dan negara, mungkin sebagai manajer atau birokrat yang handal. Prinsip akuntabilitas profesi dari pelaku ini tentulah dalam konteks manajemen dan orientasi institusional dimana dia berada, yaitu auditing. Akuntabilitas seorang manajer atau birokrat jelas berbeda dengan pelaku profesional media. Karenanya perlulah seseorang menempatkan diri secara tepat, apakah dia seorang sebagai profesional dalam lingkup manajemen, ataukah sebagai pelaku profesional media, karena masing-masing dituntut dengan standar akuntabilitas yang berbeda. Akuntabilitas dari pelaku profesional media adalah dari hasil kerjanya dengan parameter yang diukur dari pemaknaan atas wacana yang dilahirkannya dalam masyarakat.

Setiap profesi perlu dilihat konteksnya dengan masyarakat yang melingkupinya. Signifikansi profesi adalah dari makna yang berhasil dikontribusikannya ke dalam ruang publik. Inilah yang mendasari perlunya otonomi dan independensi dalam kerja profesionalnya. Otonomi dan independensi jelas bukan sesuatu yang bersifat *given*, tetapi merupakan realitas dari suatu interaksi bersifat tarik-ulur. Binari kutub hitam-putih dalam nilai hanya ada di dalam alam pikiran, sementara dalam realitas akan bergerak dengan kedekatan relatif terhadap salah satu kutub binari tadi. Masalahnya baru krusial jika ruang profesional tidak lagi bersifat tarik-ulur dengan orientasi bisnis dan negara, tetapi sudah bersifat submisif terhadap sistem yang menjadikan media sebagai komoditas ekonomi atau politik. Profesi media mudah terjerumus hanya sebagai alat dalam proses komodifikasi (*commodification*), yaitu media hanya menjadi produk yang memiliki nilai instrumen bagi pasar atau negara. Dengan kata lain media hanya menjadi produk yang dikonsumsi dalam dorongan ekonomi dan politik.

Apakah pelaku profesional media hanya akan menjadi bagian organik dari kekuasaan bisnis di pasar atau penguasa negara, tinggal sekarang bagaimana sikap seorang

profesional? Seorang profesional dituntut memiliki sikap personal yang bertolak dari otonomi dan independensinya, tidak karena sikap kolektif. Karenanya langkah awal adalah memahami posisi diri secara personal dalam menghadapi sistem.

Karenanya cara pandang terhadap suatu profesi perlu dengan kerangka intelektual, mengingat profesi bukan sekadar pekerjaan dengan kualifikasi teknis. Profesi, khususnya di bidang media, meninggalkan jejak berupa karya. Begitu suatu karya berada dalam masyarakat, tidak terelakkan untuk dinilai dalam berbagai perspektif. Penilaian tidak hanya bersifat teknis pragmatis, tetapi juga secara kontekstual.

Untuk itu perlulah kiranya mengenali lebih dulu orientasi dari sistem yang dijalankan atau akan dimasuki. Menyiapkan profesionalisme dalam bidang media pada dasarnya belajar aspek yang bersifat teknis dan etis yang dapat menjadi landasan eksistensial dalam kerja seseorang sehingga dia mampu mengemban nilai otonomi dan independensi dalam sistem media yang melingkupinya. Aspek teknis menjadi dasar dalam pengoperasian perangkat keras dan lunak, sementara aspek etis berupa penghayatan dan kesadaran atas pilihan nilai dalam konteks diri di dalam sistem media yang akan dimasuki, dan masyarakat yang akan menerima hasil kerja. Seorang profesional dituntut memiliki sikap yang bertolak dari otonomi dan independensinya secara personal, tidak karena sikap kolektif. Karenanya langkah awal adalah memahami posisi diri secara personal dalam menghadapi sistem. Dari sini perlulah kiranya mengenali lebih dulu orientasi dari sistem yang dimasuki.

#### ( 6 )

Media jurnalisme ditandai dengan fungsinya sebagai institusi sosial yang mengangkat fakta-fakta sosial sebagai informasi jurnalisme. Dengan begitu fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan berita. Berita (*news-story*) dapat dibicarakan dalam berbagai definisi, mulai dengan cara mengambil salah satu unsur kelayakan berita (*newsworthy*) seperti kebaruan (*newness*), atau penting (*significance*), atau dengan formula simpel “K” seperti konflik, kantong (uang) dan kelamin (seks). Ini semua kaidah teknis untuk memproduksi berita itu sementara bisa ditinggalkan, untuk masuk ke substansi jurnalisme, bahwa berita adalah fakta sosial yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang fakta sosial inilah kemudian ditampilkan di media massa. Motif khalayak dalam menghadapi media massa khususnya media jurnalisme pada dasarnya adalah untuk mendapatkan fakta sosial.

Orientasi jurnalisme pada dasarnya bertolak dan dua sisi, pertama bersifat teknis berkaitan dengan standar kelayakan berita (*newsworthy*), dan kedua bersifat etis dengan standar normatif dalam menghadapi fakta-fakta. Hal pertama merupakan resultan dari dorongan kepentingan pragmatis khalayak dan pengelola media. Kepentingan pragmatis khalayak dapat bersifat sosial ataupun psikhis. Sementara kepentingan pragmatis pengelola media dapat mewujud dalam kaitan politis dan ekonomis.

Dengan kepentingan pragmatis pengelola media, berakibat pada dinamika media jurnalisme yang tidak menjalankan fungsi imperatif bagi publiknya, melainkan bertolak dari kecenderungan subyektifnya sendiri maupun kepentingan subyektif pihak lain yang bukan khalayaknya. Dengan kata lain, media tidak menjalankan fungsi imperatif sosial, tetapi menjalankan fungsi organik dari institusi lainnya, seperti institusi politik dan bisnis. Kepentingan media dilihat melalui orientasinya, untuk itu dapat dihipotesiskan, yaitu dengan menjalankan orientasi sosial maka fungsi imperatif media jurnalisme akan tinggi, sebaliknya fungsi imperatif ini menjadi rendah jika media menjalankan orientasi ekonomi-politik. Hal ini juga akan bertalian dengan landasan otonomi dan independensi dengan orientasi sosial yang akan menggerakkan fungsinya dalam kebijakan pemberitaan. Kebijakan dengan orientasi sosial akan melahirkan kecenderungan obyektifikasi untuk

mencapai obyektifitas informasi, sedang dalam orientasi ekonomi-politik dalam proses komodifikasi yang menghasilkan komoditas ekonomi (bisnis) ataupun politik.

Sisi kedua adalah orientasi bersifat etis yang berada dalam tataran ideal normatif, yaitu cita-cita sosial yang ingin diwujudkan oleh pengelola media dalam kaidah profesionalisme. Dalam lingkup masyarakat demokratis, media massa khususnya media jurnalisme menjalankan fungsi imperatif secara obyektif dalam proses yang menghubungkan warga dengan kehidupan publik, dengan tujuan agar warga dapat terlindungi dan penetrasi kekuasaan struktural dari negara, modal dan sosial (komunalisme ataupun agama). Obyektifikasi warga masyarakat terhadap kehidupan publik menjadi landasan dalam kekuatan rasionalitasnya dalam menghadapi kekuasaan struktural. Dari sini keberadaan kerja jurnalisme sebagai suatu profesi dilihat perannya dalam konteks struktur sosial. Sebab suatu profesi tidak sekadar komponen dalam proses manajemen korporasi, tetapi juga bekerja dengan kekuasaan. Inilah yang mendasari perlunya kesadaran etis bagi pelaku profesi untuk berpegangan pada kaidah kebenaran.

( 7 )

Sebagai pelaku profesi yang memproses wacana yang mengisi ruang publik, maka jurnalis adalah seorang intelektual yang memiliki ruang otonomi dan independensi yang mempribadi. Dia mungkin saja menjadi bagian dari manajemen sebagai pekerja, buruh atau *koeli* (tinta), tetapi tidak harus kehilangan otonomi dan independensinya sebagai pekerja kultural, sebagaimana seorang dokter medis yang menjadi karyawan rumah sakit sebagai institusi bisnis, tetapi dia tidak boleh kehilangan otonomi dan independensinya sebagai pengabdian kemanusiaan.

Seorang jurnalis pada hakekatnya adalah pekerja kultural karena berurusan dengan wacana. Dia dapat saja menjadi semacam pedagang jika media yang diurusnya sebagai komoditas ekonomi, atau broker kekuasaan jika mengurus informasi sebagai komoditas politik. Sebagai pekerja dia tentu saja harus bertanggung-jawab secara teknis kepada manajemen tempatnya bekerja. Namun dia terikat secara moral (*moral obligation*) dalam akuntabilitas sosial kepada publik. Tanggungjawab moral inilah yang membedakan pelaku profesional dengan seorang pekerja umumnya. Pandangan yang menempatkan jurnalis sebagai pekerja dalam manajemen, telah mereduksi makna kultural profesi ini sebagai pertukangan. Agaknya ini pula yang menyebabkan kemudian pekerja jurnalisme dalam kerjanya merasa sudah cukup dengan memahami dan menjalankan jurnalisme pada tataran teknis, tidak berkehendak untuk menempatkannya pada tataran epistemologi.

Pada tataran teknis, proses kerja seorang jurnalis dalam mengolah fakta publik ke informasi jurnalisme digerakkan oleh politik pemberitaan (*newsroom policy*) dari organisasi keredaksiannya. Politik pemberitaan ini dapat berbeda antara satu media dengan media lainnya, tetapi semuanya dapat dikembalikan pada kaidah universal, yaitu sejauh mana proses pemberitaan dapat mentransformasikan wacana fakta sosial secara identik sebagai wacana fakta media. Untuk itu, prinsip pertama dalam jurnalisme adalah obyektivitas, dengan mengasumsikan bahwa khalayak media menuntut agar wacana yang tertangkap dari suatu berita (fakta media) adalah identik dengan wacana fakta sosial. Kecermatan (*accuracy*) sebagai landasan kerja jurnalisme dimaksudkan untuk menjaga agar wacana fakta media, persis alias identik dengan fakta sosial.

Prinsip berikutnya dalam jurnalisme adalah keseimbangan dan ketidak-berpihakan. Ini dua sisi mata koin dari kerja jurnalisme, yang satu menjadi penyebab lainnya. Keseimbangan menjaga ketidak-berpihakan, ketidak-seimbangan menjadikan keberpihakan, begitu bertimbal-balik. Mana yang lebih dulu, rasanya tidak perlu dicari jawabannya. Yang penting keduanya perlu diperhadapkan dengan dua dimensi dalam kerja jurnalisme yaitu fakta sosial dan fakta media.

Dari sini epistemologi dalam proses jurnalisme dijalankan untuk mendapatkan fakta yang benar dan obyektif. Epistemologi ini mengandung landasan konseptual dan metode kerja untuk memenuhi prinsip faktualitas dan obyektivitas. Proses jurnalisme pada satu sisi diwujudkan dalam fungsi penjaga gerbang (*gate-keeper*) melalui pilihan-pilihan teknis yang dilakukan oleh pengelola media dalam menghadapi fakta-fakta saat menyiapkan dan menyajikan berita, dan pada sisi selanjutnya sejauh mana obyektivitas dapat dijalankan dalam memproses fakta-fakta tersebut. Dalam kerja sehari-hari, biasanya perhatian lebih banyak diberikan terhadap kecenderungan dalam melakukan pilihan teknis atas fakta. Pilihan teknis diasumsikan untuk memenuhi kepentingan khalayak, dan lebih lanjut landasan metodologi untuk obyektivitas.

( 8 )

Setiap kali bicara soal obyektivitas, ada yang terlupakan dari masalah epistemologi dalam jurnalisme, yaitu setting dimana jurnalisme dijalankan. Kesadaran epistemologis bagi pelaku profesi jurnalisme diharapkan akan menumbuhkan sikap kritis dalam menghadapi kaidah-kaidah kelayakan berita yang menjadi acuan kerja. Umumnya kaidah-kaidah itu dikutip dari buku teks bertolak dari asumsi mengenai ruang publik yang normal. Karena itulah insiden misalnya, dianggap bermakna jika proses sosial sebelumnya tertata dalam tertib sosial (*social order*). Fakta pelanggaran hukum menjadi signifikan jika tertib sosial dominan dalam kehidupan sosial suatu masyarakat. Dengan begitu perlu dipertanyakan, pemaknaan atas suatu fakta jika ruang publik yang menjadi tempatnya bersifat anomali.

Fakta yang berlangsung tidak berada di ruang hampa, tetapi dalam ruang sosial yang memiliki kondisi struktural yang khas. Buku teks jurnalisme lazimnya bertolak dari asumsi dasar mengenai masyarakat yang bersifat ekual (azas kesamaan) dan demokratis. Artinya setiap person dapat dan terjamin untuk mewujudkan hak-haknya yang bersifat azasi. Karenanya pertanyaan krusial dalam epistemologi ini adalah, dapatkah bersikap seimbang dalam menghadapi fakta sosial yang mengandung ketidak-seimbangan? Dalam masyarakat yang strukturnya masih timpang, setiap fakta perlu dilihat dengan sudut pandang yang khas, untuk menilai sejauh mana person dapat dan terjamin atas hak-haknya.

Asumsi dasar dalam melihat masyarakat dengan kondisi struktural yang timpang yaitu adanya hambatan bagi person dalam mewujudkan hak-haknya. Hambatan ini berada pada tiga level: pertama fisik, kedua akses/interaksi personal, dan ketiga struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas. Dengan sudut pandang ini person ditempatkan dalam posisinya yang berhadapan dengan kendala-kendala atas hak-haknya. Sehingga dalam perspektif yang bertolak dari asumsi dasar ini, jurnalis dituntut membangun sudut pandang dengan memberi perhatian terhadap person yang berada dalam situasi ketidak-seimbangan dan ketidak-samaan (*inequality*).

Keseimbangan dan ketidak-berpihakan dapat dilihat dari kandungan dan konteks dari fakta sosial. Anatomi fakta sosial pada dasarnya menyangkut person-person yang berinteraksi. Setiap interaksi melibatkan pihak-pihak (dua atau lebih) di dalam struktur sosial. Posisi setiap person dapat seimbang jika kedua pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidak-seimbangan manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kekuasaan ini dapat berupa kekuatan fisik, kekuasaan negara, kekuasaan modal/ekonomi, atau pun kekuasaan kultural/komunalisme. Perspektif struktural menjadikan setiap fakta sosial diasumsikan mengandung potensi adanya ketidak-seimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (*center*) yang melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai perifer yang mengalami marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan hak-haknya.

Sesuai dengan kaidah universal, media dituntut untuk tidak berpihak (*impartiality*) dalam melakukan pemberitaan. Prinsip ini bertolak dari asumsi mengenai fakta yang menjadi materi jurnalisme, bahwa setiap fakta sosial selamanya mengandung pihak-pihak yang berinteraksi. Sementara pada sisi lain, fakta dilihat secara bersifat mikro, karenanya dipandang terlepas dari konteks struktural. Karenanya sering jurnalis hanya berkepentingan untuk menangkap fakta interaksi ini tanpa perlu mempersoalkan kualitas dari interaksi tersebut. Dari sinilah kemudian muncul dorongan untuk mengajak jurnalis menumbuhkan penghayatan atas posisi person yang akan diberitakan.

( 9 )

Dalam menghadapi proses kerjanya jurnalis pada umumnya bertolak dari kaidah teknis yang biasa disebut sebagai nilai berita atau standar kelayakan berita. Kadangkala kaidah teknis ini dianggap sebagai dogma yang keramat, dengan melupakan masalah epistemologi yang mendasari kerja profesi ini. Dalam kaidah epistemologi, jurnalis perlu melakukan pendefinisian (*defining*) atas ranah fakta dan informasi. Untuk itu perlu disadari bahwa setiap pendefinisian selamanya bertolak dari preferensi atau kecenderungan terarah dari pihak yang mendefinisikan. Preferensi ini dapat dalam konteks skala pribadi, kolektif dalam manajemen korporasi, atau yang lebih universal. Selain itu preferensi dapat juga bersifat subyektif atau sebaliknya obyektif. Berbagai buku teks jurnalisme umumnya memberikan pendefinisian atas fakta sekaligus informasi jurnalisme. Dalam pendefinisian informasi pada hakikatnya berada dalam rentangan antara penting (*significance*) dan menarik (*interesting*). Dengan pengertian ini setiap fakta dilihat selalu berada di antara dua titik ekstrim, dengan arah pendulum ke salah satu kutub. Dalam kerja jurnalistik biasanya kedua aspek ini merupakan rekayasa teknis. Karenanya setiap fakta yang penting, diusahakan agar menjadi menarik dalam penyampaiannya, sementara fakta yang menarik tetap dicari unsur yang bernilai penting.

Lebih jauh nilai berita suatu fakta dapat dilihat dari dua sisi, pertama bersifat intrinsik, terkandung dalam fakta itu sendiri, dan kedua bersifat ekstrinsik sesuai dengan pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak. Suatu fakta pada dasarnya merupakan penggalan dari suatu proses sosial, dan sebagai suatu peristiwa yang tidak diperkirakan terjadinya. Dengan kata lain, makna suatu fakta tidak dapat dilepaskan dari ruang sosial dimana fakta itu muncul. Pada sisi lain, secara ekstrinsik fakta tadi memiliki makna bagi kehidupan khalayak dimana fakta itu muncul. Pada sisi lain, secara ekstrinsik fakta tadi memiliki makna bagi kehidupan khalayak.

Dengan demikian suatu fakta hanya dapat dipandang bernilai jika ditempatkan dalam proses sosial yang menjadi "ruang"-nya. Di jalan yang lalu-lintasnya sehari-hari lancar dan tenang, sekali terjadi kemacetan dan kehirukan maka fakta itu akan memiliki nilai yang tinggi. Sebaliknya, jalan raya yang sehari-hari macet di Jakarta, di saat ditinggal pemudik maka kelengangan akan menjadi suatu fakta bernilai. Ruang publik yang didominasi kemelaratan misalnya, akan menempatkan wacana kemewahan memiliki nilai tinggi. Sementara dalam ruang kemewahan, kemiskinan menjadi tontonan yang eksotis.

Makna bagi khalayak merupakan dasar dalam pendefinisian suatu fakta dapat bertolak dari motif khalayak sepenuhnya, tetapi pada tataran etis pertanyaan yang menyertainya akan mencari jawaban kontekstual, apa makna fakta itu bagi kehidupan kultural khalayak? Demikianlah obyektifitas berada dalam kaidah epistemologi untuk mencapai kebenaran. Tetapi pada tataran etis, kebenaran itu ditempatkan dalam konteks makna kultural.

Secara sederhana makna dapat diuji melalui konsep bertentangan secara binari (*binary opposition*). Nilai kelayakan informasi yang dijadikan acuan dalam menilai suatu fakta kiranya perlu dikembangkan dalam konteks ruangnya. Artinya fakta bukanlah suatu

ranah yang steril. Secara konvensional konteks suatu fakta dilihat pertaliannya dengan fakta lain, baik bersifat sebab-akibat maupun pertalian kategoris sejajar. Sementara konteks lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah yang bersifat paradigmatis, yaitu asumsi tentang ruang publik yang menjadi “tempat” bagi suatu fakta, untuk kemudian dipertalikan dengan makna yang ingin ditampilkan. Dengan kata lain, setiap teks jurnalistik dipandang sebagai suatu wacana yang berpretensi untuk menghadirkan makna untuk “bertanding” di ruang publik dengan berbagai makna lainnya. “Pertandingan” ini ada yang bersifat diametral, yaitu dalam berhadapan dengan makna yang dilahirkan oleh kekuasaan politik, ekonomi atau kultural (komunalisme).

Suatu fakta memiliki konteks terhadap maknanya dalam ruang publik. Makna selamanya bersifat dikhotomi, sebagaimana dalam filsafat “yin” dan “yang”. Dengan kata lain, suatu fakta pada dasarnya memiliki makna bersifat kontekstual. Secara sederhana binari oposisi ini dapat dipilah dalam kutub “kiri” yang memiliki kesamaan dan kedekatan makna, dan disebaliknya terdapat kelompok lainnya berupa kutub “kanan”. Dapat diilustrasikan berikut:

“KIRI”	←	←	FAKTA	→	→	“KANAN”
Yin			?			Yang
Perdamaian			?			Peperangan
Ketenteraman			?			Kekacauan
Kerukunan			?			Perkelahian
Kemakmuran			?			Kemelaratan
Kekayaan			?			Kemiskinan
Kecerdasan			?			Kebodohan
Altruisme			?			Egoisme
“Bottom-up”			?			“Top-down”
“Empowerment”			?			Dominasi
Demokrasi			?			Tirani
.. dan seterusnya						

Polaritas dikhotomi oposisi binari merupakan konsep yang bersifat digital, karenanya selamanya mengandung pergeseran makna dari kiri ke kanan, dan sebaliknya. Dengan kata lain, pemaknaan suatu fakta tidak pernah bersifat absolut, dengan adanya kecenderungan oposisi makna yang memberi pemaknaan alternatif. Di antara suatu polaritas terkandung konsep-konsep yang akan merelatifkan makna suatu makna.

Di dalam polaritas dikhotomi oposisi binari ini terdapat oposisi bersifat langsung, dan yang bersifat tidak langsung. Signifikansi makna “perdamaian” berposisi langsung dengan “peperangan”, tetapi dimungkinkan pula berposisi secara tidak langsung dengan “kekacauan”, atau yang lebih jauh seperti “kebodohan”.

Berita adalah cerita tentang fakta. Sementara cerita dibangun dengan bertitik tolak dari subyek yang dipilih, dan dari sini fakta direkonstruksikan. Subyek pada dasarnya merupakan fokus dari penceritaan atau pendeskripsian. Jika ada 2 pihak yang berinteraksi dalam fakta, maka subyek yang menjadi fokus berita memiliki konteks makna pada salah satu sisi dari oposisi binari. Sehingga wacana yang lahir adalah cerita tentang sisi binari tersebut, sementara sisi lain sebagai komplementer dalam konstruksi fakta. Penentuan sudut pandang (*angle*) dalam fokus penceritaan ini merupakan faktor dalam pengwujudan wacana, tidak ada kaitan dengan azas keseimbangan. Dengan kata lain, dalam merekonstruksikan fakta, seorang jurnalis mutlak harus dengan azas keseimbangan, yaitu dengan memberi peluang yang sama bagi orang (person) dari setiap pihak dalam fakta.

Pertanyaan apakah seorang jurnalis itu kerja perburuhan atau profesi, sama sekali tidak relevan. Sebab sebagai profesi yang memproses wacana untuk bertanding di ruang publik, maka jurnalis adalah seorang intelektual yang memiliki ruang otonomi dan independensi yang mempribadi. Dia dapat saja menjadi bagian dari manajemen sebagai pekerja, buruh atau *koeli* (tinta), tetapi tidak kehilangan otonomi dan independensinya sebagai pekerja kultural, sebagaimana seorang dokter medis yang menjadi karyawan rumah sakit tetapi tidak boleh kehilangan otonomi dan independensinya sebagai pengabdian kemanusiaan.

Seorang jurnalis merupakan pekerja kultural karena pada hakekatnya berurusan dengan wacana. Dia memang menjadi pedagang jika yang diurusnya komoditas ekonomi, atau makelar kekuasaan jika mengurus informasi sebagai komoditas politik. Sebagai pekerja dia tentu saja harus bertanggung-jawab secara teknis kepada manajemen tempatnya bekerja. Tetapi dia terikat secara moral dalam akuntabilitas sosial kepada publik. Tanggungjawab moral inilah yang membedakan pekerja profesional dengan seorang pekerja. Pandangan yang menempatkan jurnalis sebagai pekerja dalam manajemen, telah mereduksi makna kultural profesi ini sebagai pertukangan. Agaknya ini pula yang menyebabkan kemudian pekerja jurnalisme merasa sudah cukup dengan memahami dan menjalankan jurnalisme pada tataran teknis, tidak berkehendak untuk menempatkannya pada tataran epistemologi.

Kesadaran epistemologis akan menumbuhkan sikap kritis dalam menghadapi kaidah-kaidah kelayakan berita yang menjadi acuan kerja. Umumnya kaidah-kaidah itu dikutip dari buku teks bertolak dari asumsi mengenai ruang publik yang normal. Karenanya, insiden misalnya, dianggap bermakna jika proses sosial sebelumnya tertata dalam tertib sosial (*social order*). Pelanggaran hukum menjadi signifikan jika tertib sosial dominan adanya dalam kehidupan sosial. Akan lain pemaknaannya jika ruang publik yang menjadi ajang bagi media jurnalisme bersifat anomie, sehingga fakta akan bersifat anomali.